

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 188-401.040/13/2023**

**TENTANG  
PENETAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya pembahasan bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun perlu memberikan Penetapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dimaksud sebelum disampaikan untuk dilakukan evaluasi kepada Gubernur Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan Penetapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Panitia Khusus I DPRD Kota Madiun dan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 6 Juni 2023 dan 23 Juni 2023 membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 4 Juli 2023 dengan acara Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus I atas Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 7 Juli 2023 dengan acara Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pemandangan Umum sekaligus Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA** : Sebagaimana Diktum “KESATU” agar Wali Kota Madiun menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan untuk mendapat evaluasi.
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal 7 Juli 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA MADIUN**  
Ketua,  
  
**ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.**